



Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah

*Pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026
(12 Feb 2026 - 11 Mar 2026)*



Disusun Oleh:
Pusat Kajian Daerah dan Anggaran



publikasmasda.dpd.go.id



REDAKSI

PENASIHAT

Komjen. Pol. H. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H.
Dr. Lalu Niqman Zahir, S.Sos., M.Si
Oni Choiruddin S.H., M.H.
Dr. Sri Sundari, SH., MM., CGCAE

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Syulfah Sari Dewi Syam, S.E., M.M
Dr. Rahmat Hollyson Maiza, M.AP

PIMPINAN REDAKSI

Marthen S. Rundupadang, S.H., M.H.
Dra. Mediana Pongsitanan, S.H., M.H.
Andika Prima Sari, S.I.P., M.Si

REDAKTUR PELAKSANA

Novi Alvisah Yusammi, S.E., M.M.

STAF REDAKSI

Arie Aat Hartadi, S.E., M.A.
Fandi Rizki Rosyari, S.I.P., M.Tr.AP.
Khalizzad Khalis, S.M.B., M.Tr.AP.
Nanda Puspita, S.E., M.A.
Nunung Ariyani, S.E., M.A.
Rosdiana Rizal, S.H., M.A.
Khusni Tamrin. S.Sos.
Rindang Mustikawati, S.E.
Moh.Yusuf, S.H.
Edrida Pulungan, S.E., M.H.I., M.Si.E
Irma Artanastiti, S.H.
Mardyana Malawat, S.H.
Didin Darmawan, S.Kom.

Tata Letak dan Design

Aida Fitris Ahmalia, S.I.P.
Lita Vieryna, S.Kom.



Tunki Rachman Sanusi, S.H.
Zyat Intan Delimasari, S.E.
Haviva Amalia N.P, S.Pd.
Muhammad Irza, S.H.
Yenny Anggraeni, S.Sos
Iwuk Anggertina
Ajeng Putri Ayu W, S.I.P.
Diana Septaviana, S.H., M.H
Ryanti Ramadani, S.Kom.
Rama Dhesriyan, S.I.P.
Rahmadiansyah, S.I.P.



ASPIRASI MASYARAKAT & DAERAH

Sumber Legitimasi Pelaksanaan Tugas-Tugas Konstitusional DPD RI

Anggota DPD RI



Berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. **(Pasal 258 poin h UU MD3)**

Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya. **(Pasal 258 poin i UU MD3)**

DPD RI



DPD wajib menampung dan menindaklanjuti aspirasi. **(Pasal 237 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib)**

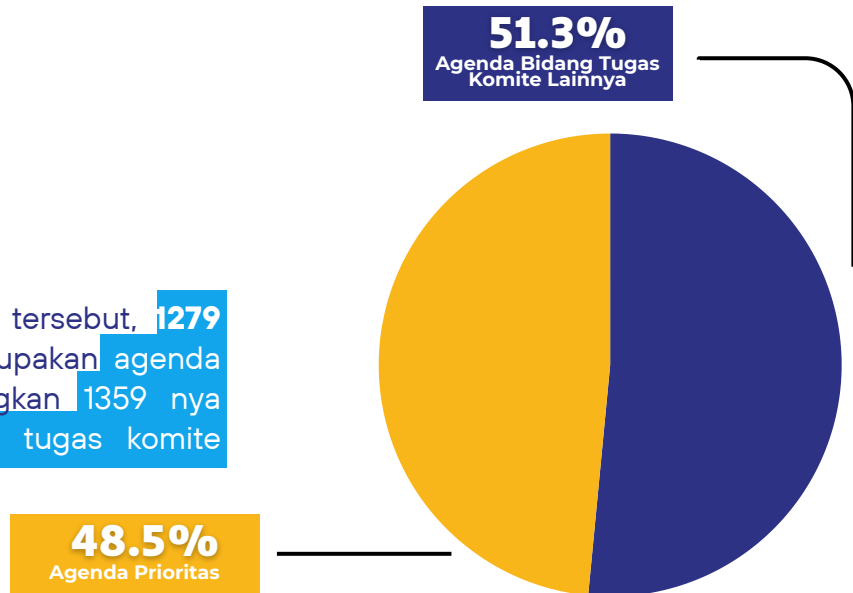
DPD wajib memperjuangkan program yang menjadi aspirasi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat daerah. **(Pasal 237 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib)**



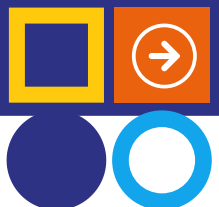
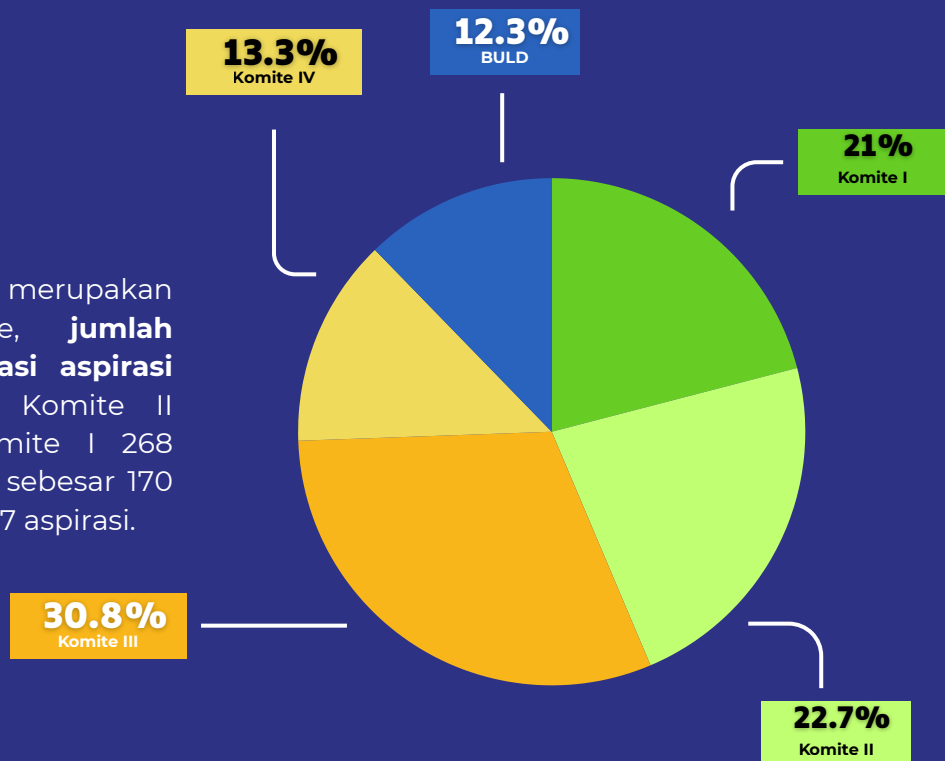
TOTAL ASPIRASI PADA MASA RESES DI MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2025-2026

telah diserap adalah sebanyak 2638 aspirasi

Dari total aspirasi 2638 tersebut, 1279 aspirasi diantaranya merupakan agenda prioritas komite sedangkan 1359 nya adalah agenda bidang tugas komite lainnya.



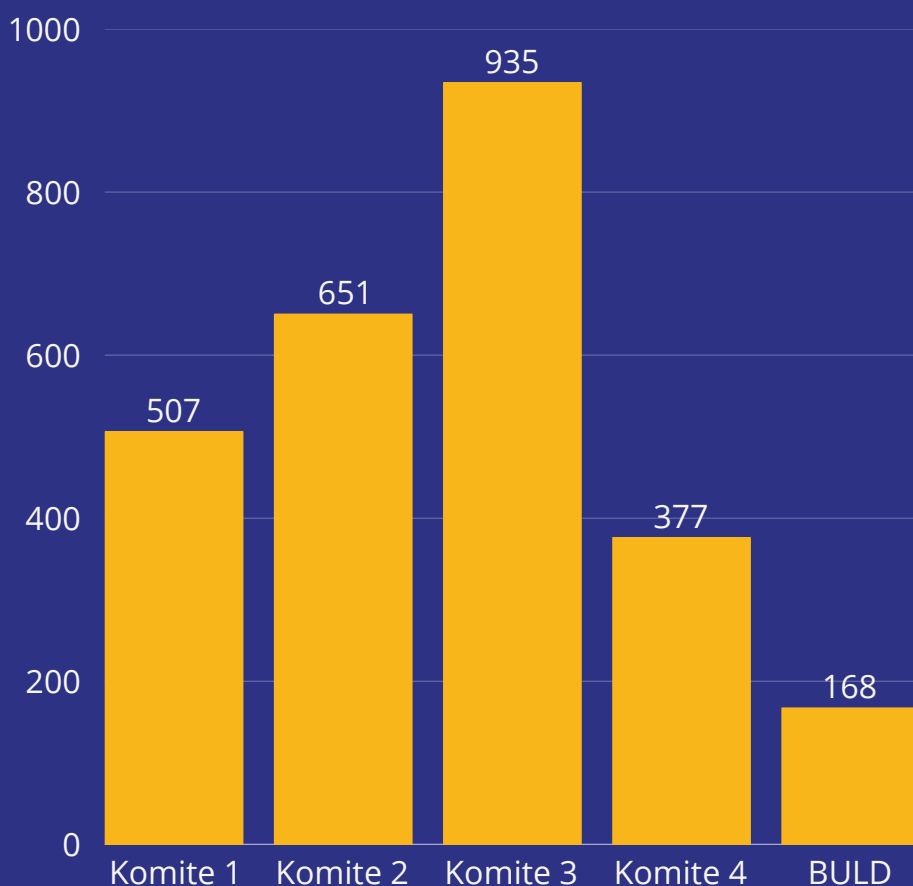
Dari 1279 aspirasi yang merupakan agenda prioritas Komite, jumlah terbesar merupakan aspirasi aspirasi Komite III 394 aspirasi, Komite II sebanyak 290 aspirasi Komite I 268 aspirasi, Disusul, Komite IV sebesar 170 aspirasi, dan BULD sebesar 157 aspirasi.



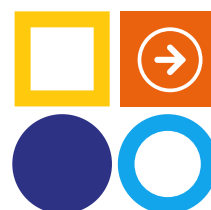
TOTAL ASPIRASI PADA MASA RESES DI MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2025-2026

04

telah diserap adalah sebanyak 2638 aspirasi



Dari total 2638 aspirasi, jumlah terbesar merupakan aspirasi Komite III 935 aspirasi, Komite II sebanyak 651 aspirasi, Komite I 507 aspirasi, Komite IV sebesar 377 aspirasi, dan BULD sebesar 168.

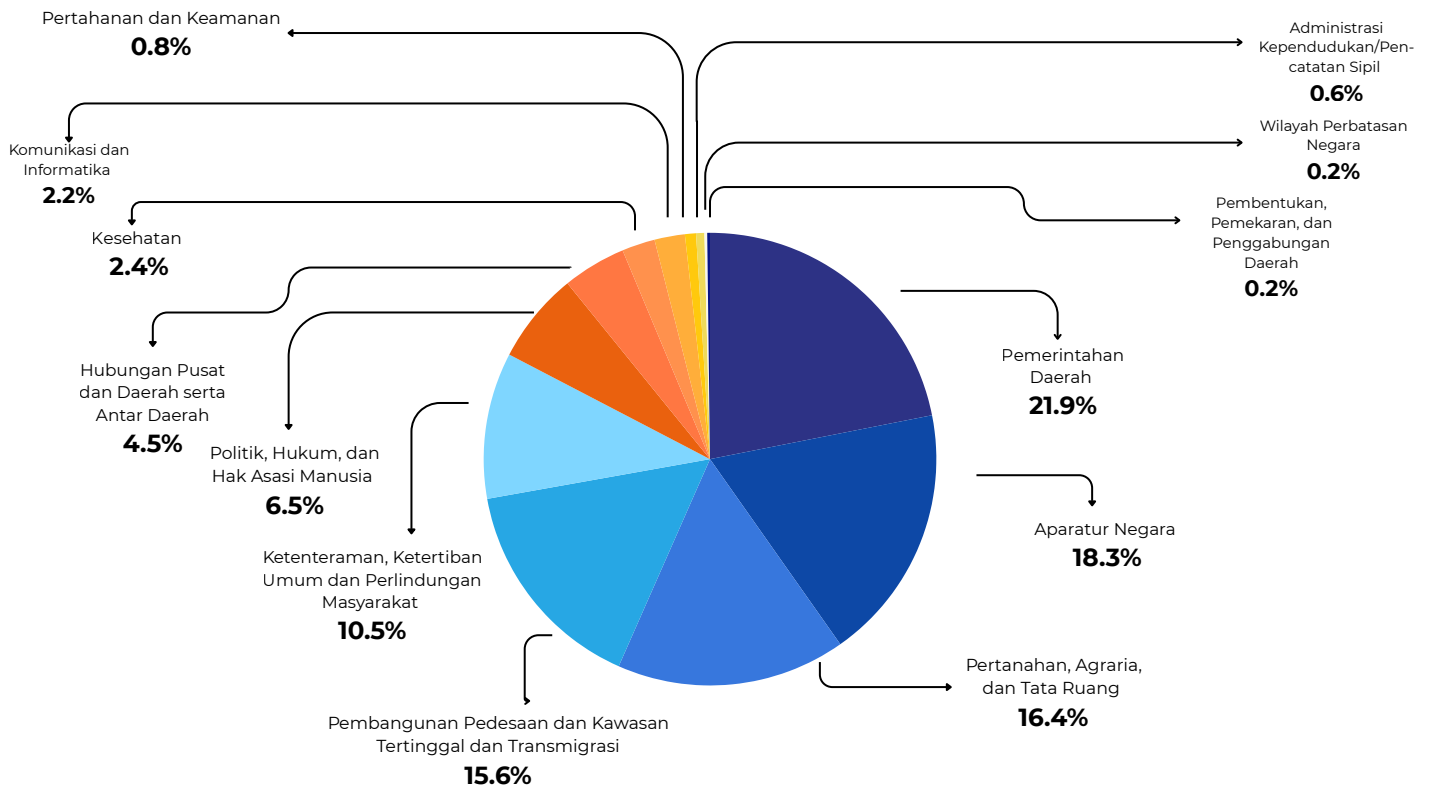




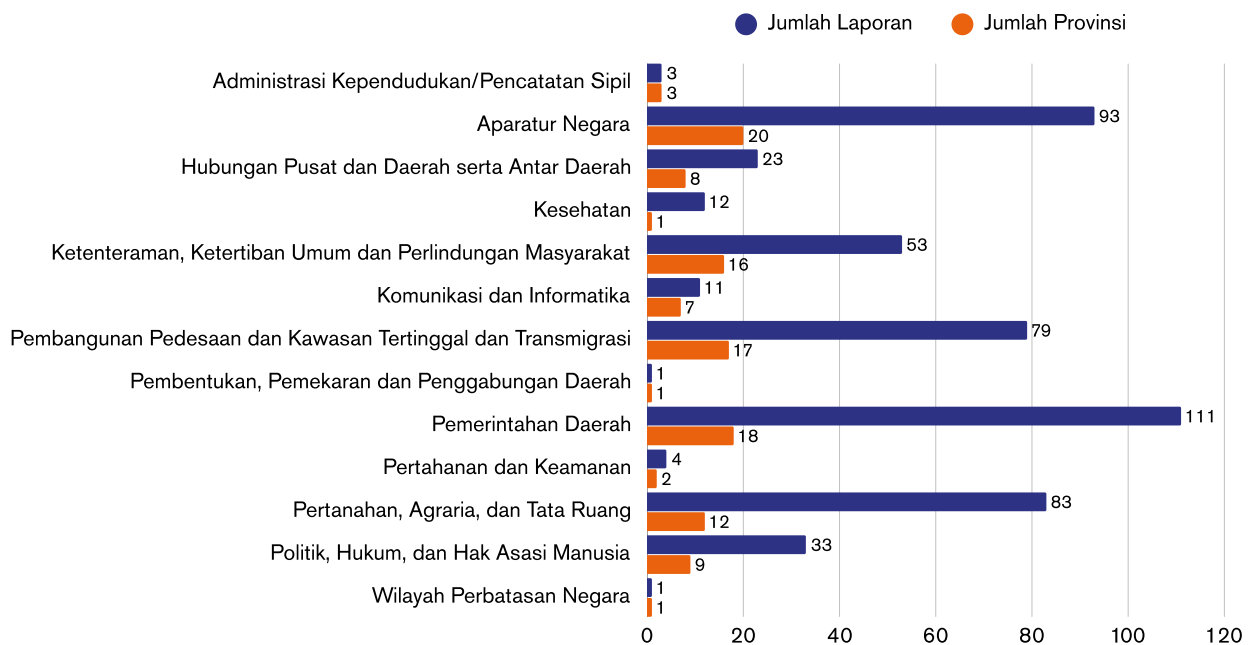
ASPIRASI KOMITE I



Prosentase Aspirasi Komite I Berdasarkan Bidang Tugas



Jumlah Provinsi dan Jumlah Aspirasi Berdasarkan Bidang Tugas



Isu Strategis Berdasarkan Agenda Prioritas



01

Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN

- Karakter geografis yang luas, wilayah perbatasan yang masif, serta keterbatasan infrastruktur menyebabkan ketimpangan distribusi dan kurangnya kompetensi ASN, terutama pada sektor layanan dasar (pendidikan dan kesehatan).
- Kekurangan signifikan tenaga PPPK di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis yang diperburuk oleh geografis yang luas (pedalaman, pesisir, perbatasan).
- Menuntut implementasi penuh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 untuk mewujudkan kesetaraan antara PPPK dan PNS, terutama dalam aspek perlindungan hari tua dan jenjang karier.



02

Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Terkait Urusan Wajib

- Pengurangan alokasi TKD berdampak sistemik karena merupakan pilar utama pendanaan APBD untuk urusan wajib, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
- Kerusakan infrastruktur jalan yang semakin meluas dan kondisi jembatan yang rusak parah di titik-titik strategis, yang kini telah mencapai tahap mengganggu aktivitas dasar masyarakat.
- Pemerintah pusat diminta segera mengakhiri kebijakan jeda atau moratorium pemekaran karena sudah terlalu lama yaitu sejak tahun 2014.

Isu Strategis Berdasarkan Agenda Prioritas



03 Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Adanya pemutusan kontrak sepihak terhadap pendamping desa yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (Caleg) pada Pemilu 2024, yang dinilai sebagai dampak dari ketidakpastian regulasi dan intervensi politik di tingkat kementerian.
- Masih terdapat ketimpangan akses energi yang signifikan, di mana sekitar 28 desa di wilayah pelosok Kabupaten Kotawaringin Timur hingga saat ini belum teraliri listrik sama sekali.
- Adanya kekhawatiran mengenai beban finansial dan teknis distribusi program KDMP yang melibatkan dana pinjaman dalam jumlah besar tanpa petunjuk teknis yang cukup transparan



04 Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Adanya resistensi sosial yang kuat di kawasan rawan narkoba seperti Kampung Muara Bahari, Kampung Berlan, dan Kampung Ambon, yang menghambat efektivitas kerja BNNP dalam memberantas peredaran gelap narkoba.
- Tingginya kerawanan peredaran narkoba di Entikong sebagai wilayah lintas batas (border), yang kini telah merambah secara mengkhawatirkan ke kalangan remaja dan pelajar.
- Adanya ketimpangan penegakan aturan di dalam Lapas yang memungkinkan jaringan narkoba tetap eksis melalui celah suap dan lemahnya pengawasan terhadap pihak luar.

Bidang Tugas Lainnya Komite I



Aparatur Negara

- Masih terdapat ketidakpastian terkait mekanisme pengangkatan, sistem pengajian, serta jaminan perlindungan sosial bagi tenaga honorer dan PPPK.
- Keterbatasan jumlah tenaga strategis, rendahnya disiplin dan kompetensi aparatur.
- Koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, penerapan sistem kinerja ASN.

Pertanahan, Agraria, & Tata Ruang

- Masih terjadinya tumpang tindih kepemilikan dan ketidakjelasan status lahan yang memicu konflik pertanahan di masyarakat.
- Belum optimalnya penyelesaian konflik agraria antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta dalam penguasaan serta pemanfaatan lahan.
- Belum optimalnya kepastian hukum dan penataan tata ruang dalam pemanfaatan lahan, termasuk perlindungan hak masyarakat adat dan percepatan pelayanan pertanahan.

Pemerintahan Daerah

- Belum meratanya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar di daerah, termasuk jalan, drainase, akses transportasi, perumahan layak huni, serta pengendalian abrasi dan banjir.
- Belum optimalnya dukungan dan koordinasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
- Belum optimalnya pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Desa, kawasan Tertinggal dan Transmigrasi

- Belum optimalnya tata kelola kebijakan Dana Desa yang berdampak pada keterbatasan fleksibilitas desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan dasar.
- Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan pendampingan aparatur desa untuk mencegah kesalahan pengelolaan Dana Desa.
- Belum meratanya pembangunan & pemberdayaan ekonomi (BUMDes dan PADes) dalam perencanaan pembangunan desa.

Bidang Tugas Lainnya Komite I



Politik, Hukum, dan HAM

- Kebutuhan penguatan kerangka hukum dan regulasi untuk melindungi hak masyarakat dan kelompok adat.
- Terbatasnya akses terhadap bantuan hukum dan literasi hukum masyarakat.
- Kualitas demokrasi dan ketahanan sosial masih menghadapi tantangan.

Hubungan Pusat dan Daerah Serta Antar Daerah

- Diperlukan penguatan koordinasi dan kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Ketimpangan kapasitas pembangunan dan fiskal antar daerah masih menjadi tantangan
- Perlunya penguatan dukungan pusat terhadap kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Komunikasi dan Informatika

- Terbatasnya akses dan kualitas infrastruktur telekomunikasi di beberapa wilayah.
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung ekonomi dan kreativitas masyarakat.
- Tantangan tata kelola informasi dan ekosistem digital di era kecerdasan buatan.

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Linmas

- Perlunya penguatan keamanan dan perlindungan masyarakat di berbagai wilayah.
- Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung ketertiban sosial masyarakat.
- Penguatan peran dan kesejahteraan unsur masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial.

Bidang Tugas Lainnya Komite I



Pertahanan dan Keamanan

- Tingginya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) akibat posisi geografis nunukan sebagai titik transit utama lintas batas Indonesia-Malaysia.
- Kekhawatiran masyarakat atas lemahnya transparansi dan ketatnya pemeriksaan di pintu masuk internasional (Bandara SAMS Sepinggan, Pelabuhan, dan Akses masuk Tarakan).
- Kerusakan parah jalan umum di Batu Gajah akibat aktivitas truk angkutan batu bara yang melanggar batas tonase (ODOL)

Administrasi Kependudukan/ Pencatatan Sipil

- Belum optimalnya ketepatan sasaran data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berpotensi menghambat akses warga terhadap layanan kesehatan esensial.
- Masih adanya penduduk yang belum terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), sehingga mereka tidak memiliki NIK atau identitas resmi.
- Perlunya pendampingan dan koordinasi intensif dalam pengembangan data kependudukan khusus bagi Orang Asli Papua (OAP) di wilayah perkotaan seperti kota Jayapura.

Wilayah Perbatasan Negara

- Terdapat kesenjangan antara kemegahan infrastruktur fisik Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan realitas ekonomi masyarakat lokal. Pembangunan PLBN saat ini dinilai masih bersifat "sentris gerbang" (hanya fokus pada fungsi perlintasan dan administratif) dan belum menjadi motor penggerak ekonomi.

Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah

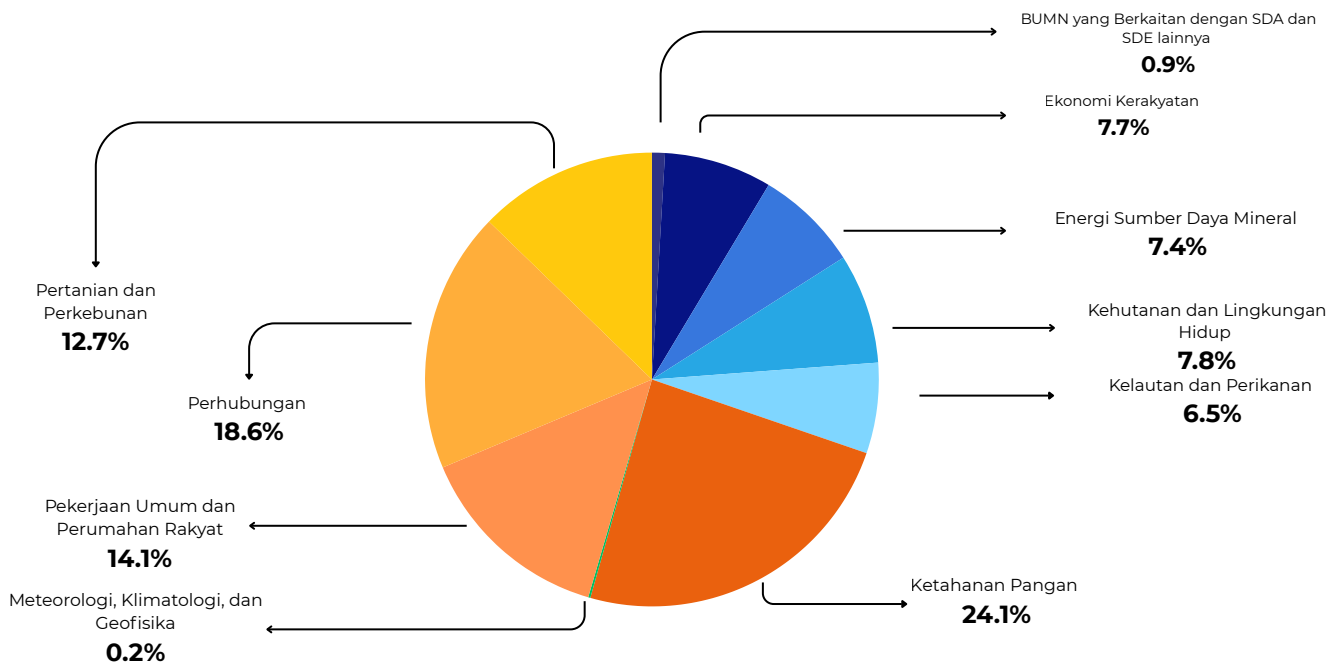
- Stagnasi usulan pemekaran Provinsi Tapanuli selama puluhan tahun yang berdampak pada lambatnya pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Sumatera Utara - Riau. Hal ini memicu aspirasi ekstrem dari perantau (IKMTS) agar wilayah asal mereka diintegrasikan ke Provinsi Riau demi mendapatkan kualitas infrastruktur jalan yang lebih baik.



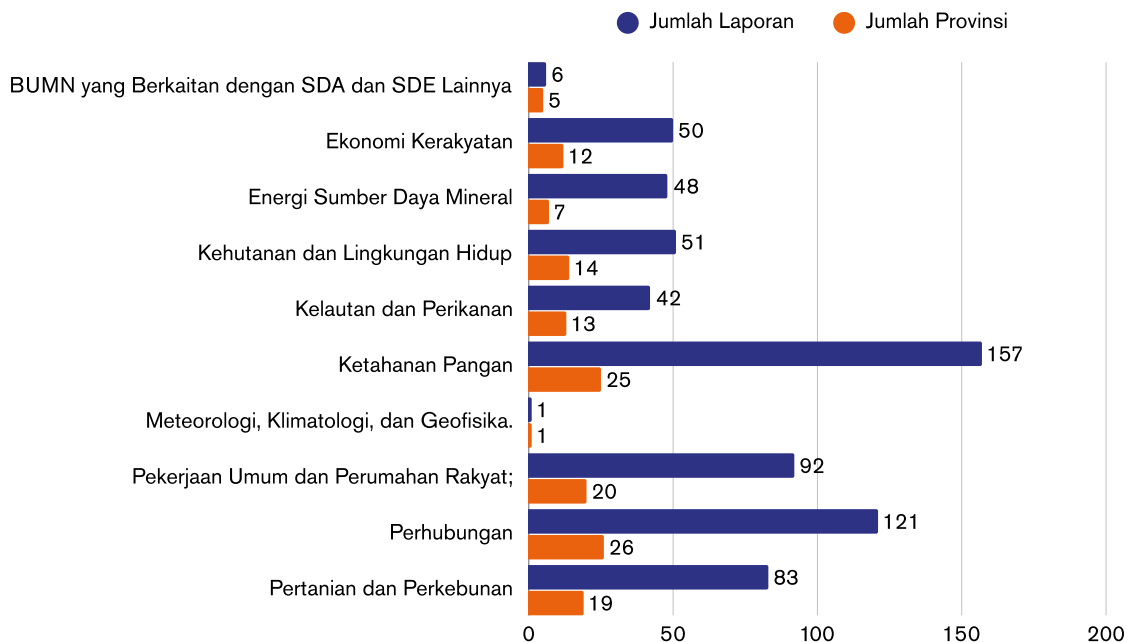
ASPIRASI KOMITE II



Prosentase Aspirasi Komite II Berdasarkan Bidang Tugas



Jumlah Provinsi dan Jumlah Aspirasi Berdasarkan Bidang Tugas



Isu Strategis Berdasarkan Agenda Prioritas



01 Inventarisasi Materi UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

- Lemahnya perlindungan produsen. Harga gabah yang seringkali jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), lonjakan kenaikan beberapa harga komoditas jelang hari raya, dan perlindungan usaha tani seperti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) masih menghadapi kendala implementasi.
- Keterbatasan infrastruktur pertanian. Hal ini seperti petani mengeluhkan ketersediaan air irigasi yang tidak stabil.
- Kerentanan distribusi dan sistem logistik pangan antarwilayah. Hal ini seperti tingginya biaya distribusi pangan.
- Ancaman perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan keberlanjutan pangan.



02 Inventarisasi Materi UU No. 17 Tahun 2008 Pelayaran

- Keterbatasan kapasitas infrastruktur pelabuhan dan konektivitas logistik. Di mana banyak pelabuhan di berbagai wilayah menghadapi keterbatasan kapasitas infrastruktur baik dari sisi dermaga, terminal penumpang, dan fasilitas bongkar muat.
- Kerentanan sistem transportasi laut terhadap lonjakan penumpang musiman. Lonjakan kendaraan pada sistem transportasi laut nasional.
- Keterbatasan infrastruktur dan legalitas pelayaran rakyat serta transportasi sungai. Hal ini seperti keterbatasan infrastruktur dermaga, fasilitas keselamatan, dan aspek legalitas operasional kapal.
- Inefisiensi sistem logistik maritim dan tingginya biaya transportasi laut. Di mana aspirasi masyarakat menyoroti tingginya biaya logistik laut yang berdampak pada harga barang.

Bidang Tugas Lainnya Komite II



Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat

- Jalan rusak dan konektivitas wilayah yang belum memadai baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, hingga jalan desa. Selain itu keterbatasan ketersediaan jembatan yang memadai.
- Kesulitan akses air bersih dan layanan dasar masyarakat.
- Lemahnya perlindungan permukiman dari risiko bencana.
- Layanan publik dasar dan penataan fasilitas umum yang belum optimal.

Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- Pengelolaan lingkungan hidup dan infrastruktur lingkungan yang belum optimal.
- Pengelolaan SDA dan tata kelola kawasan hutan perlu dioptimalkan untuk menghindari degradasi hutan akibat penebangan liar serta lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan hutan.
- Penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi daerah.

Perhubungan

- Penguatan infrastruktur dan konektivitas transportasi. Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya pengembangan infrastruktur pelabuhan dan sarana transportasi laut yang mendukung distribusi logistik dan mobilitas, keterbatasan konektivitas transportasi udara, dan peremajaan kapal penyeberangan.
- Peningkatan keselamatan dan tata kelola transportasi.
- Peningkatan pelayanan transportasi dan aksesibilitas masyarakat.

Kelautan dan Perikanan

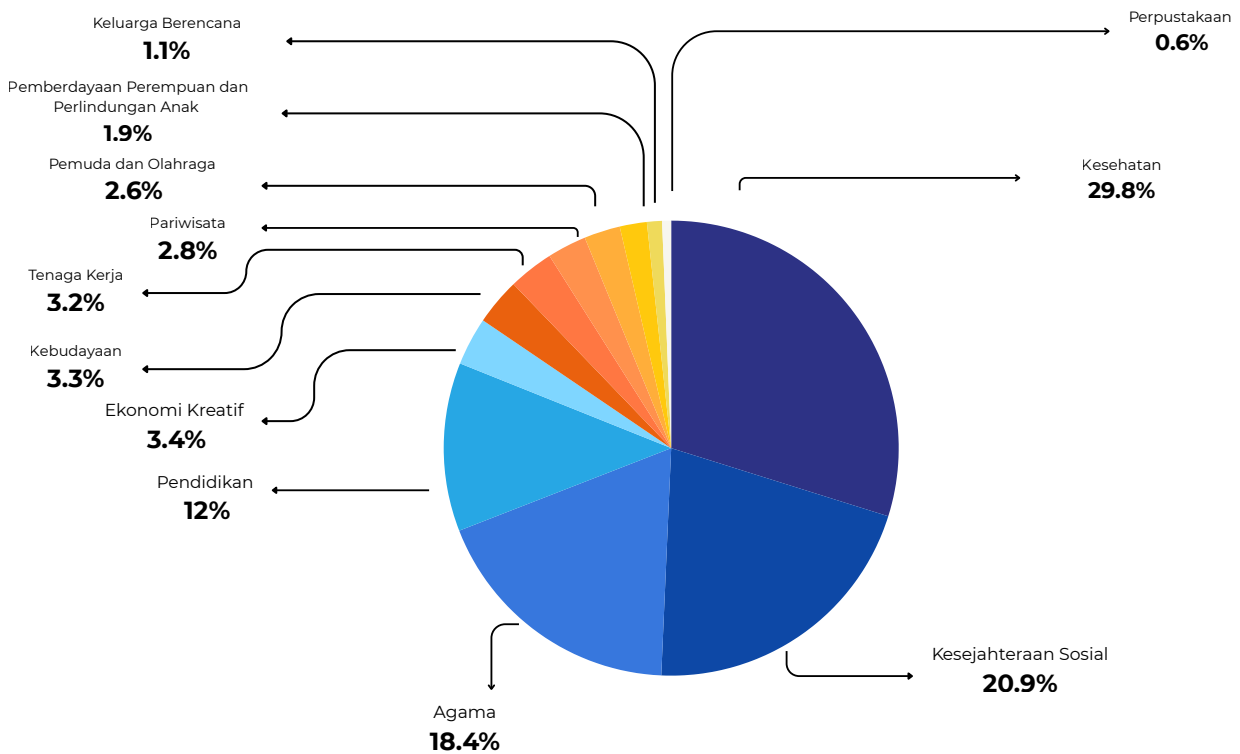
- Penguatan infrastruktur pelabuhan dan sarana perikanan.
- Keselamatan pelayaran dan pengawasan aktivitas laut.
- Pemberdayaan ekonomi nelayan dan penguatan sektor perikanan nelayan.
- Penguatan transportasi laut dan konektivitas wilayah pesisir.
- Perlindungan lingkungan pesisir dan keberlanjutan sumber daya laut.



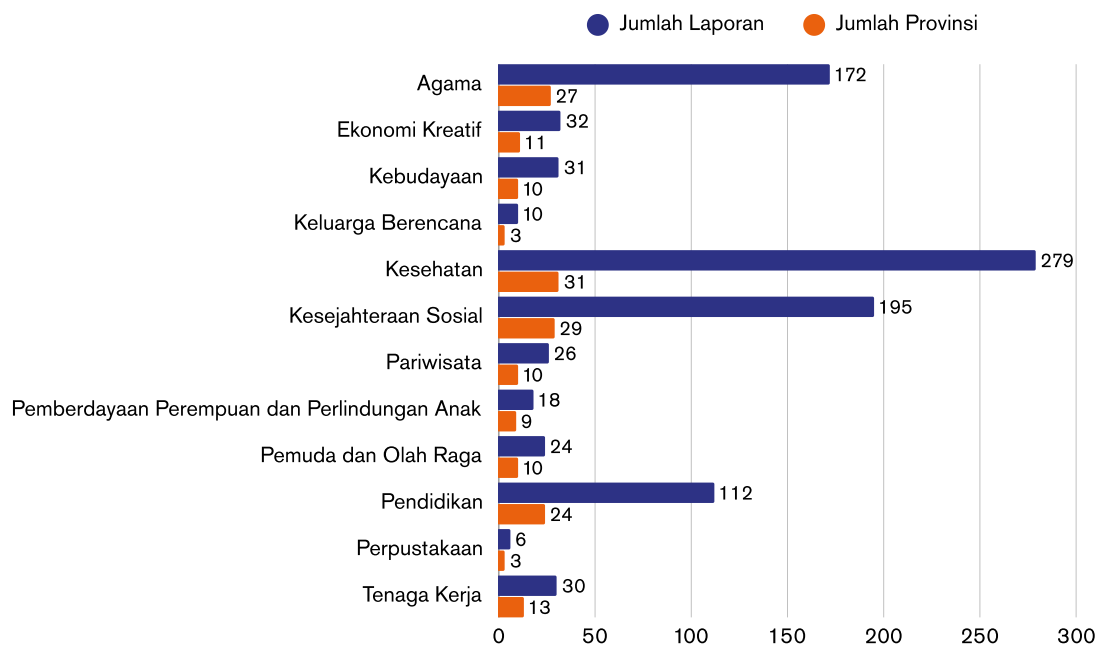
ASPIRASI KOMITE III



Prosentase Aspirasi Komite III Berdasarkan Bidang Tugas



Jumlah Provinsi dan Jumlah Aspirasi Berdasarkan Bidang Tugas



Isu Strategis Berdasarkan Agenda Prioritas



01

Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, terkait Implementasi Pengintegrasian Data Penerima Bantuan Sosial ke dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

- Krisis Layanan Kesehatan Akibat Penonaktifan Massal Peserta PBI JKN Tanpa Notifikasi Dini yang Proaktif. Adanya kegagalan sistem notifikasi yang seharusnya memberikan peringatan dini kepada peserta sebelum penonaktifan dilakukan. Proses integrasi data antarinstansi (Kemensos, BPJS, dan Dukcapil) seringkali tidak diikuti dengan verifikasi faktual yang sinkron, sehingga memicu tingginya angka error.
- Kerumitan Birokrasi dan Administratif dalam Prosedur Reaktivasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Warga Miskin. Sistem reaktivasi saat ini belum memiliki standar waktu layanan (SLA) yang pasti, sehingga penyelesaiannya bisa memakan waktu berminggu-minggu. Analisis menunjukkan perlunya desentralisasi kewenangan verifikasi agar proses aktivasi dapat diputuskan secara lebih cepat di tingkat daerah.



02 Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terkait Kesehatan Mental

- Keterbatasan fasilitas, integrasi layanan yang belum optimal, serta standar pelayanan daerah yang tidak seragam. keterbatasan fasilitas, integrasi layanan yang belum optimal, serta standar pelayanan daerah yang tidak seragam.
- Terbatasnya jumlah tenaga kesehatan mental, seperti psikiater, psikolog klinis, serta tenaga kesehatan jiwa lainnya, serta belum meratanya distribusi tenaga tersebut di berbagai daerah, terutama di wilayah luar Jawa dan daerah terpencil. Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan afirmatif untuk meningkatkan jumlah sekaligus pemerataan tenaga kesehatan mental serta penguatan kapasitas di layanan dasar.

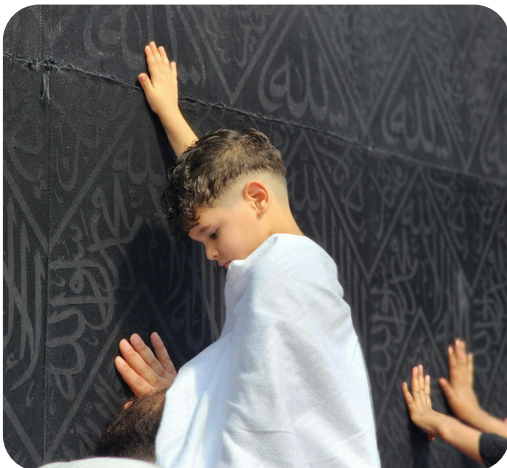
Isu Strategis Berdasarkan Agenda Prioritas



03

Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terkait Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M di Daerah

- Urgensi Penguatan Manajemen Kesehatan dan Fasilitas Inklusif bagi Jemaah Lansia dan Risiko Tinggi. Diperlukan sinkronisasi data istitaah kesehatan secara real-time antara puskesmas dan sistem penyelenggara haji agar tidak ada jemaah dalam kondisi kritis yang diberangkatkan.
- Tantangan Geografis dan Logistik bagi Jemaah di Wilayah Perbatasan serta Daerah Non-Embarkasi. Diperlukan kajian mendalam untuk meningkatkan status beberapa bandara strategis menjadi embarkasi penuh guna memutus rantai logistik yang tidak efisien.



Bidang Tugas Lainnya Komite III



Pendidikan

- Ketimpangan Akses Pendidikan Berkualitas Akibat Kebijakan Zonasi dan Keterbatasan Sekolah Unggulan di Wilayah Perbatasan. Diperlukan juga peningkatan kualitas guru dan sarana pada sekolah-sekolah yang sudah ada agar kualitasnya mendekati sekolah di kota.
- Hambatan Administratif Dapodik dan PPG yang Menghalangi Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD/TK. Komitmen anggaran daerah untuk insentif guru PAUD seringkali belum menjadi prioritas utama dibandingkan sektor lain

Kesejahteraan Sosial

- Ketidaktepatan Sasaran dan Sinkronisasi Data Penerima Bantuan Sosial. integrasi dan pemutakhiran data kesejahteraan sosial antara pemerintah pusat dan daerah belum berjalan optimal.
- Keterbatasan Kapasitas Layanan Kesejahteraan Sosial di Daerah. Pelayanan kesejahteraan sosial di daerah masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan anggaran.

Kesehatan

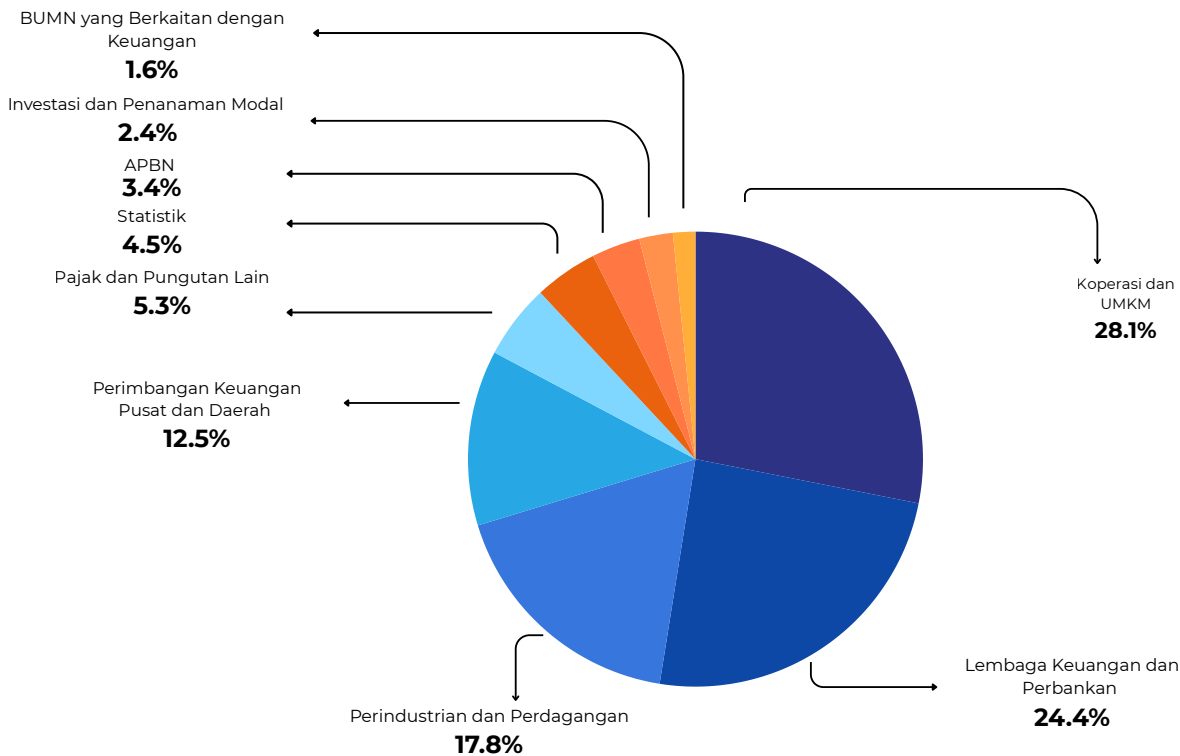
- Ketimpangan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Antarwilayah. Distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang belum merata serta keterbatasan dukungan infrastruktur kesehatan di daerah menjadi faktor utama.
- Tantangan Keberlanjutan Pembiayaan dan Layanan Jaminan Kesehatan Nasional. Perlu diimbangi dengan penguatan sistem pembiayaan, kapasitas fasilitas kesehatan, serta tata kelola pelayanan agar keberlanjutan program dapat terjaga.



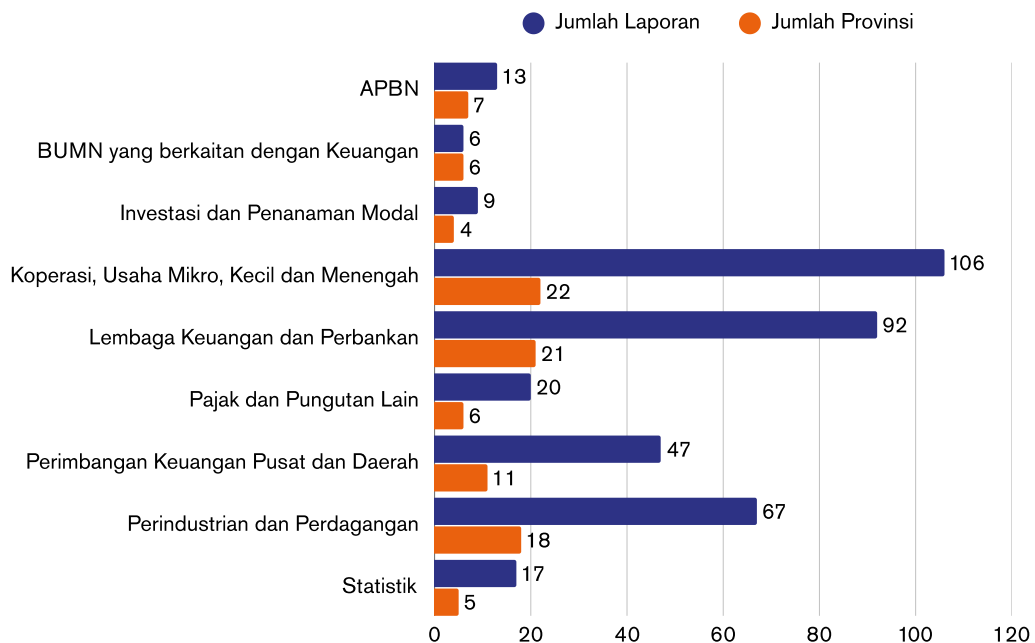
ASPIRASI KOMITE IV



Prosentase Aspirasi Komite IV Berdasarkan Bidang Tugas



Jumlah Provinsi dan Jumlah Aspirasi Berdasarkan Bidang Tugas



Isu Strategis Berdasarkan Agenda Prioritas



01

Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009. Serta penyerapan aspirasi masyarakat terkait penggantian UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK

- Penanganan darurat dan pemulihan dari dampak kebakaran Desa Muara Adang.
- Adanya ketimpangan yang lebar antara lonjakan harga kebutuhan pokok dengan tingkat pendapatan masyarakat di sektor akar rumput (petani dan pedagang kecil) menjelang momentum Ramadhan dan Idul Fitri.
- Masyarakat dan pelaku usaha mendesak adanya keterbukaan informasi yang lebih mendalam dan mudah diakses mengenai dinamika harga di tingkat daerah. Diperlukan publikasi rutin dan transparan mengenai angka inflasi daerah agar masyarakat dapat memantau fluktuasi daya beli secara real-time atau periodik.



02

Isu-isu aktual lainnya di lingkup tugas Komite IV

- BPD menuntut pengakuan yang lebih proporsional dalam regulasi nasional (UU P2SK) sesuai dengan kontribusi asetnya yang besar. Selain itu, diperlukan dukungan fiskal melalui RKAT OJK agar fungsi perlindungan dan edukasi konsumen di daerah memiliki daya jangkau yang lebih luas.
- Pelaku UMKM lokal masih berada dalam posisi yang rentan akibat tekanan pasar global dan belum terciptanya ekosistem pemasaran yang inklusif dengan jaringan ritel besar.
- Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital melalui platform marketplace belum dibarengi dengan sistem pengawasan dan instrumen fiskal yang memadai, sehingga menciptakan ketimpangan pasar.

Bidang Tugas Lainnya Komite IV



Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

- Keterbatasan akses permodalan dan pembiayaan bagi UMKM.
- Rendahnya kapasitas SDM dan literasi usaha (digital, manajemen, dan pemasaran).
- Kendala legalitas usaha dan standar produk (NIB, halal, BPOM, dan sertifikasi).
- Keterbatasan akses pasar dan daya saing produk lokal.
- Tekanan biaya produksi dan ketidakstabilan harga komoditas.

Lembaga Keuangan dan Perbankan

- Rendahnya literasi keuangan dan maraknya pinjaman online.
- Lemahnya perlindungan konsumen dan pengawasan praktik perdagangan.
- Ketimpangan akses layanan keuangan dan digitalisasi sistem pembayaran di daerah.
- Fluktuasi harga pangan dan tekanan inflasi terhadap daya beli masyarakat.
- Tata kelola kebijakan publik dan program pemerintah yang belum optimal (bansos, sertifikat tanah, kebijakan fiskal daerah).

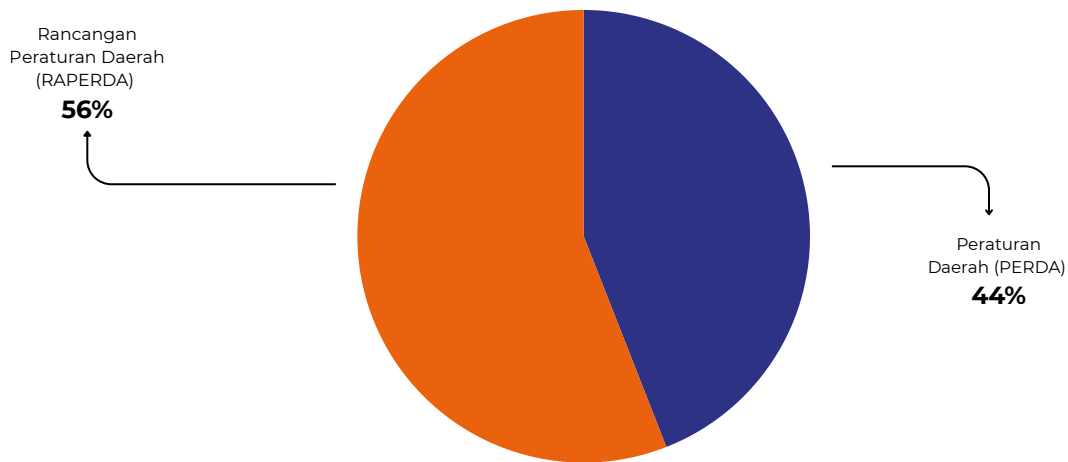
Perindustrian dan Perdagangan

- Kenaikan harga pangan dan tekanan inflasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat.
- Kendala distribusi pangan dan ketersediaan bahan baku.
- Persaingan dan perlindungan terhadap produk serta pasar lokal.
- Permasalahan tata kelola pasar tradisional dan aktivitas perdagangan.
- Tantangan sektor industri, pertanian, dan ketahanan ekonomi daerah.

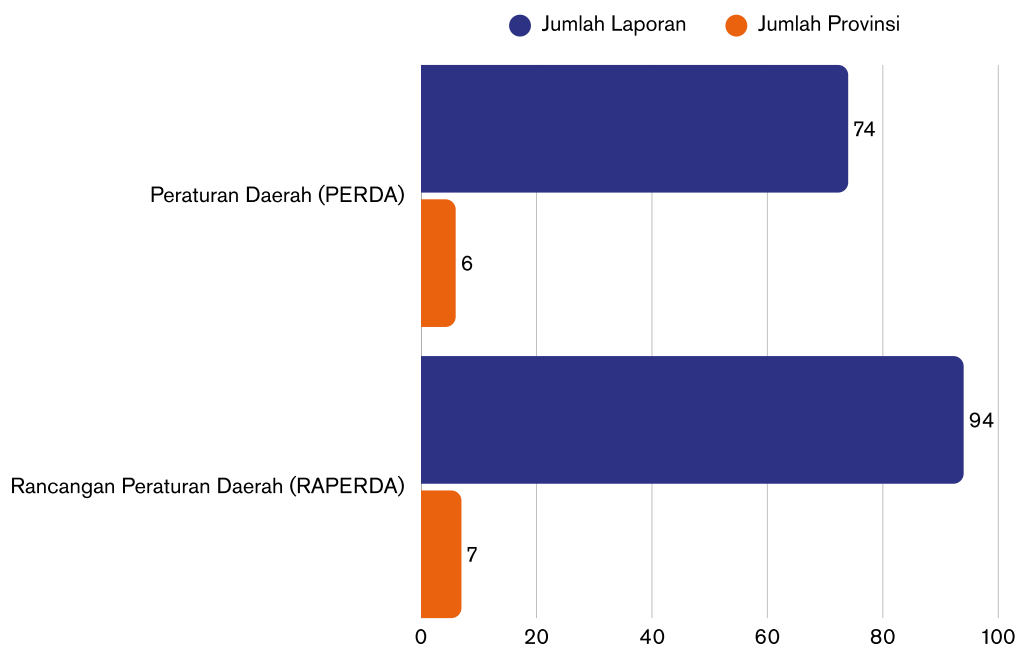
BULD



Prosentase Aspirasi BULD Berdasarkan Bidang Tugas



Jumlah Provinsi dan Jumlah Aspirasi Berdasarkan Bidang Tugas



Isu Strategis Berdasarkan Agenda Prioritas



01 Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Penyelenggaraan Pendidikan

- Penggunaan dana pendidikan untuk membiayai program MBG menyebabkan pemotongan signifikan pada dana bantuan operasional sekolah. Hal ini menyebabkan penurunan anggaran yang mencapai Rp700.000 per siswa ini berdampak langsung pada penurunan kualitas dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang diterima siswa di sekolah.
- Terjadi pergeseran kewenangan signifikan yang belum terakomodasi dalam kerangka hukum daerah saat ini sehingga muncul ketidaksesuaian norma (inkonsistensi hukum) antara praktik di lapangan dengan aturan tertulis.



Bidang Tugas Lainnya BULD



Peraturan Daerah

- Terjadi pergeseran kewenangan signifikan yang belum terakomodasi dalam kerangka hukum daerah saat ini sehingga muncul ketidaksesuaian norma (inkonsistensi hukum) antara praktik di lapangan dengan aturan tertulis.
- Penggunaan dana pendidikan untuk membiayai program MBG menyebabkan pemotongan signifikan pada dana bantuan operasional sekolah.



Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA)

- Adanya kesenjangan waktu (time gap) antara penetapan regulasi daerah dengan perubahan kebijakan nasional yang fundamental sehingga terjadi kekosongan atau ketidaksesuaian norma. Praktik tata kelola di lapangan saat ini tidak memiliki sandaran hukum (payung hukum) yang sinkron pada level daerah.
- Perda harus menghapus dikotomi bantuan yang hanya berfokus pada sekolah negeri.



Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah

